

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Bastian 2014. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Martha. 2011. *Analisis Pengaruh Laba Akuntansi dan Komponen*.
- Fauziyah, Ida. 2020. *Fraud Triangle Theory*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi. (<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi> diakses pada 21 Januari 2021)
- Ghozali, Rosalina, dan Yanti, Darma. 2018. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Studi Pada Desa Gunung Jati, Desa Kuripan, Dan Desa Sukaraja*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. (www.google scholar.com diakses pada 11 Februari 2021).
- IHPS 1 BPK RI *Periode 2016-2020*.
- INewsSumsel.id *kasus korupsi di kabupaten ogan komering ulu* (<https://sumsel.inews.id/berita/selama-2019-polres-oku-ungkap-dua-korupsi-dana-desa-senilai-rp763-juta> diakses pada 17 Mei 2021).
- Khairudin. dan Erlanda, Rina. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera)*. Jurnal Ekonomi, Universitas Bandar Lampung. (www.google scholar.com diakses pada 21 Januari 2021).
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Bappenas, Jakarta. (<https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi-partisipasi-disusun-oleh-dra-loina-lalolo-krina-p.html> diakses pada 21 Januari 2021).
- Kurniawan, Teguh. 2009. *Peranan Akuntabilitas Publik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi. ISSN: 0854-3844. No.2. Vol.16.

- Universitas Indonesia. (www.google.com diakses pada 21 Januari 2021).
- Mahmudi 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muindro, Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 *Tentang Perangkat Daerah Merupakan Implikasi Langsung Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Pasal 9 *Tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota Merupakan Unsur Penunjang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 *Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*
- Pintauli, Lili Siregar. 2020. *Fraud Triangle Theory*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi.
- Pramesti, lia dan Hariyanto. 2019. *Akuntabilitas Dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. (www.google.com diakses pada 11 Februari 2021).
- Sari, Suci Anggun dan Prabowo, Trijatmiko Wahyu. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Batang*. Jurnal Akuntansi. ISSN: 2337-3806. NO. 3. Vol 8. Universitas Diponegoro. (www.google.com diakses pada 21 Januari 2021).
- Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPU) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. (www.google.com diakses pada 11 Februari 2021).
- Transparency International Indonesia. 2008. *Mengukur Tingkat Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 *Tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 *Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jenis Tindakan Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Korupsi.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 *Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*